

# Analisis Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada CV. ABCD

Febriana Amelia<sup>1</sup>, Darno<sup>2</sup>

Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo

febriana\_amelia@student.umaha.ac.id<sup>1</sup>, darno@dosen.umaha.ac.id<sup>2</sup>

## Informasi Artikel

Vol: 2 No : 4 2026

Halaman : 71-84

## Keywords:

SAK ETAP

Financial Statement

Compliance

Entities Without Public

Accountability

Recognition and Disclosure

## Abstract

This study analyzes the compliance of financial statements prepared by CV. ABCD, a stone trading company, with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP), examined from the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure, and describes the company's financial statement preparation cycle. A descriptive-comparative qualitative approach was used, with CV. ABCD's 2023–2024 financial statement documents as primary data, analyzed through documentation and comparison against SAK ETAP provisions. Results show that CV. ABCD has completely presented all required components of the financial statements, and that its measurement of fixed assets and inventories, as well as its presentation of cash flows using the indirect method, comply with SAK ETAP. However, five material non-compliances were identified: unrecognized income tax expense, unrecognized post-employment benefit obligations, inconsistent equity balances between periods, inadequate disclosure of unnotarized additional capital, and an untraceable note reference for the prepaid tax account. The preparation of CV. ABCD's financial statements is therefore not yet fully compliant with SAK ETAP, particularly in recognition and disclosure, and improvements in these areas are needed to produce more reliable, transparent, and comparable financial statements.

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh CV. ABCD, sebuah perusahaan perdagangan batu, dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang ditelaah dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, serta menggambarkan siklus penyusunan laporan keuangan perusahaan tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif digunakan, dengan menggunakan dokumen laporan keuangan CV. dokumen laporan keuangan CV. ABCD tahun 2023–2024 sebagai data primer, yang dianalisis melalui dokumentasi dan perbandingan terhadap ketentuan SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. ABCD telah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan yang diwajibkan secara lengkap, dan bahwa pengukuran aset tetap serta persediaan, serta penyajian arus kas menggunakan metode tidak langsung, telah sesuai dengan SAK ETAP. Namun, teridentifikasi lima ketidakpatuhan material: beban pajak penghasilan yang tidak diakui, kewajiban manfaat pasca-kerja yang tidak diakui, saldo ekuitas yang tidak konsisten antar periode, pengungkapan yang tidak memadai atas tambahan modal yang tidak disahkan notaris, serta referensi catatan yang tidak dapat dilacak untuk akun pajak dibayar di muka. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan CV. ABCD belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP, khususnya dalam hal pengakuan dan pengungkapan, dan perbaikan di bidang-bidang tersebut diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan dapat dibandingkan.

**Kata Kunci :** SAK ETAP, Kesesuaian Laporan Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Pengakuan dan Pengungkapan

## PENDAHULUAN

Semakin kompleksnya operasi bisnis mengharuskan perusahaan untuk mengelola transaksi keuangan secara sistematis melalui laporan keuangan yang andal sebagai dasar

pengambilan keputusan (Dharma et al., 2023). Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan diatur oleh DSAK-IAI melalui empat pilar SAK, salah satunya adalah SAK ETAP, yang secara khusus berlaku bagi entitas kecil hingga menengah tanpa akuntabilitas publik yang signifikan (Rasyid, 2022). CV. ABCD, sebagai perusahaan perdagangan batu skala menengah yang diklasifikasikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik, perlu menerapkan SAK ETAP agar laporan keuangannya lebih terorganisir, konsisten, dan dapat diandalkan bagi pemilik, manajemen, serta pihak eksternal seperti kreditor (Tuli & Mahmud, 2025).

Pengamatan awal terhadap laporan keuangan CV. ABCD untuk periode 2023–2024 menunjukkan bahwa, meskipun semua komponen laporan keuangan telah disusun, terdapat sejumlah item yang tidak konsisten serta keterbatasan dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan, sehingga memerlukan tinjauan yang lebih mendalam mengenai kepatuhannya terhadap SAK ETAP. Penelitian sebelumnya mengenai penerapan SAK ETAP di UMKM umumnya hanya menilai kelengkapan laporan atau hambatan dalam pelaksanaannya—seperti pada kasus UMKM Penjualan Pisang yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan SAK ETAP (Maryanto, 2019)—dan sebagian besar berfokus pada pemahaman akuntansi umum para pelaku UMKM tanpa mengkaji kepatuhan substantif di dalam entitas dengan karakteristik bisnis tertentu (Hakim et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan CV. ABCD dengan SAK ETAP dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, guna memberikan gambaran empiris mengenai penerapan standar tersebut dalam praktik nyata serta berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan perdagangan lain dengan karakteristik serupa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparatif melalui observasi dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai proses penyusunan laporan keuangan, sehingga judul penelitian ini adalah “Analisis Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan—Entitas yang Tidak Bertanggung Jawab kepada Publik di CV. ABCD.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi dapat dipahami tidak hanya sebagai kegiatan pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sistem informasi yang berfokus pada penyediaan data untuk pengambilan keputusan ekonomi. American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan data ekonomi untuk membantu pengguna informasi membuat penilaian dan keputusan yang tepat (Satria & Fatmawati, 2021). Kieso, Weygandt, dan Warfield memandang akuntansi sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan (Halim et al., 2021), sementara Warren, Reeve, dan Duchac menekankan akuntansi sebagai kegiatan layanan yang menghasilkan data keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi (Afif, 2022). Dalam konteks Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia memandang akuntansi sebagai proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga informasi yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan, termasuk dalam kerangka SAK ETAP (Kartikahadi et al., 2023). Berdasarkan berbagai definisi tersebut, akuntansi dapat diringkas sebagai sistem informasi keuangan yang terorganisir, mengikuti standar tertentu, dan berfokus pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi memiliki tiga kelompok tujuan utama. Tujuan umum akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya (Yusuf & Omasrianto, 2025). Tujuan khusus akuntansi berkaitan dengan kepentingan pengguna tertentu: membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian; membantu pemilik dan

investor menilai imbal hasil dan risiko; serta membantu kreditor mengevaluasi kemampuan entitas untuk memenuhi kewajibannya, termasuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP sebagai dasar evaluasi oleh pihak eksternal (Rahmawati et al., 2025). Selain tujuannya, akuntansi juga menjalankan lima fungsi utama yang saling terkait: fungsi mencatat transaksi secara akurat dan kronologis (Jauhari et al., 2021); fungsi mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun tertentu (Ayem & Kentari, 2025); fungsi merangkum data ke dalam laporan keuangan (Abbas et al., 2025); fungsi melaporkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna internal dan eksternal (Asmarawati, 2026); serta fungsi memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas secara berkala (Abbas et al., 2025).

## 2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara terstruktur untuk suatu periode tertentu, yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kasnya sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi mengenai cara entitas tersebut memperoleh, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya (Adillah et al., 2025).

Menurut IASB, tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi (kegunaan bagi pengambilan keputusan) (Ayuk Yuliana, 2023). IAI menambahkan bahwa laporan keuangan juga mencerminkan kepatuhan suatu entitas terhadap standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Umum (SAK Umum), Standar Akuntansi ETAP (SAK ETAP), Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah), atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAK Pemerintah) (Sardjan & Basra, 2023).

Dengan demikian, laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai ringkasan informasi keuangan yang sistematis dan terstandarisasi, yang disusun untuk mendukung pengambilan keputusan dan penilaian akuntabilitas manajemen.

Ruang lingkup laporan keuangan terdiri dari lima komponen yang saling melengkapi (Pratama & Epi, 2024):

1. **Laporan Posisi Keuangan/Neraca** – Menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu.
2. **Laporan Laba Rugi** – Menggambarkan kinerja entitas dalam menghasilkan laba melalui selisih antara pendapatan dan beban selama periode tertentu.
3. **Laporan Perubahan Ekuitas** – Menjelaskan perubahan saldo ekuitas yang disebabkan oleh laba atau rugi, setoran modal, atau penarikan modal.
4. **Laporan Arus Kas** – Menyajikan arus kas masuk dan keluar yang dikategorikan ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.
5. **Catatan atas Laporan Keuangan** – Memberikan informasi tambahan, seperti kebijakan akuntansi dan rincian pos-pos tertentu, untuk mencegah kesalahpahaman terhadap laporan keuangan utama.

Secara keseluruhan, kelima komponen ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas; oleh karena itu, kelima komponen tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah satu sama lain.

## 3. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat prinsip, konsep, metode, dan aturan teknis yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu entitas. SAK bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan disusun secara seragam, konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, sehingga bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi (Sardjan & Basra, 2023). Di Indonesia, SAK ditetapkan dan dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi

yang berwenang, yang memainkan peran krusial dalam memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di tengah lingkungan bisnis yang semakin dinamis (Muslimah, 2024).

Secara konseptual, SAK mewakili penerapan operasional kerangka konseptual pelaporan keuangan, yang tidak hanya mengatur aspek teknis pencatatan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai profesional, etika, dan kehati-hatian dalam praktik akuntansi (Muslimah, 2024). Menurut IAI, SAK berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa informasi keuangan memenuhi kriteria relevansi, keandalan, komparabilitas, dan keterpahaman, sekaligus berperan sebagai alat untuk menyelaraskan praktik akuntansi di berbagai entitas (Kartikahadi et al., 2023). Dalam konteks globalisasi, SAK Indonesia juga terus diselaraskan dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) guna meningkatkan kualitas dan komparabilitas laporan keuangan secara internasional tanpa mengabaikan kebutuhan dan karakteristik domestik (Purba et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, SAK dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja normatif dan teknis yang mengatur cara pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan entitas.

Jenis-jenis SAK di Indonesia terbagi menjadi empat kategori (Ayu Purba et al., 2025):

1. **Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK UMUM/PSAK)** — Ditujukan bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan (perusahaan terbuka, bank, lembaga keuangan besar); mengadopsi dan selaras dengan IFRS, dengan tingkat kompleksitas tinggi baik dalam pengukuran maupun pengungkapan, mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, instrumen keuangan, dan pengungkapan risiko.
2. **Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)** – Ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan namun tetap perlu menyusun laporan untuk pihak eksternal (pemilik, kreditor); lebih ringkas, menekankan biaya historis dan metode pengakuan yang sederhana, relevan bagi perusahaan dagang dan UMKM.
3. **Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)** – mengatur penyusunan laporan keuangan bagi entitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup transaksi seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan zakat.
4. **Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP)** – Meskipun tidak diterbitkan oleh IAI untuk sektor swasta, standar ini sering digunakan sebagai acuan konseptual; standar ini berlaku khusus bagi entitas sektor publik dengan penekanan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Keempat jenis SAK ini menunjukkan bahwa standar akuntansi di Indonesia dirancang agar fleksibel, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas mulai dari perusahaan publik besar hingga organisasi sektor pemerintah dan organisasi syariah.

#### **4. Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

SAK ETAP adalah standar akuntansi yang dirancang khusus untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, namun tetap menyusun laporan keuangan untuk pemangku kepentingan eksternal seperti pemilik dan kreditor. Standar ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih sederhana dan praktis tanpa mengorbankan keandalan informasi (Afkarini & Febriana, 2025; Kartikahadi et al., 2023).

Secara konseptual, SAK ETAP merupakan adaptasi dari IFRS untuk UKM yang disesuaikan dengan kondisi bisnis di Indonesia, dengan menekankan prinsip-prinsip kesederhanaan, biaya historis, dan pengungkapan terbatas, sehingga cocok untuk UKM dan perusahaan perdagangan (Madaharsa & Muslimin, 2025). Standar ini menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan

informasi keuangan yang andal dan keterbatasan kapasitas entitas dalam menerapkan Standar Akuntansi Umum yang didasarkan pada IFRS (Afkarini & Febriana, 2025).

Karakteristik entitas pengguna: mereka tidak memiliki akuntabilitas publik dan tidak terdaftar di pasar modal (Azizah et al., 2025); mereka menerbitkan laporan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Dewan Standar Akuntan Indonesia, 2016); mereka umumnya merupakan UMKM dengan operasi dan transaksi yang sederhana, tanpa instrumen kompleks seperti derivatif (Hariza et al., 2025). Tidak ada ambang batas eksplisit untuk aset atau pendapatan, tetapi sering merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM: usaha kecil (aset Rp50–500 juta, pendapatan Rp300 juta–2,5 miliar) dan usaha menengah (aset Rp500 juta–10 miliar, pendapatan Rp2,5–50 miliar) (Afkarini & Febriana, 2025; Azizah et al., 2025).

Ruang lingkup SAK ETAP mencakup empat aspek (Gaghenggang et al., 2022):

1. **Entitas** – Perusahaan perdagangan, jasa, dan manufaktur skala kecil hingga menengah yang tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban publik yang signifikan.
2. **Laporan keuangan** – Laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan SAK Umum.
3. **Pengakuan dan pengukuran** – Penggunaan biaya historis, bukan nilai wajar, untuk mengurangi kompleksitas perhitungan.
4. **Pengungkapan** – Terbatas pada informasi yang relevan untuk memastikan laporan tetap mudah dipahami oleh pengguna.

## 5. Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Laporan keuangan dianggap sesuai jika penyusunannya mematuhi ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam standar yang berlaku, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan. Dalam konteks SAK ETAP, kesesuaian didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap standar yang disederhanakan—yang memudahkan penerapan tanpa mengorbankan kualitas informasi. Menurut IAI, laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP harus menyajikan posisi keuangan secara wajar dan konsisten antar periode; dengan demikian, kepatuhan juga mencerminkan akuntabilitas manajemen (Kartikahadi et al., 2023).

Empat dimensi kepatuhan:

1. **Pengakuan** – Ketepatan waktu pengakuan transaksi (aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban) berdasarkan ekspektasi manfaat ekonomi; ketidakpatuhan sering kali muncul dalam pengakuan pendapatan/beban yang mengabaikan prinsip akrual (Susanto et al., 2020).
2. **Pengukuran** – Penentuan nilai tercatat, umumnya berdasarkan biaya (bukan nilai wajar seperti dalam Standar Akuntansi Umum); ketidakakuratan membuat informasi menjadi tidak objektif (Lestari et al., 2024).
3. **Penyajian** – Struktur laporan keuangan yang sistematis dan konsisten (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan); konsolidasi akun atau penghilangan laporan tertentu mengurangi kegunaan laporan keuangan (Lestari et al., 2024).
4. **Pengungkapan** – Meskipun lebih sederhana, pengungkapan ini tetap harus mencakup kebijakan akuntansi serta rincian aset dan liabilitas yang signifikan agar laporan keuangan tidak kehilangan konteksnya (Susanto et al., 2020).

Ruang lingkup kepatuhan mencakup: batasan entitas yang menggunakan SAK ETAP (entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan namun tetap melaporkan

kepada pengguna eksternal), jenis laporan keuangan yang dianalisis (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CaLK), serta kebijakan akuntansi entitas, yang harus konsisten dan setiap perubahannya harus diungkapkan secara memadai.

## METODE

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan logika dan bukti empiris (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif, yang dipilih untuk menggambarkan kondisi aktual penyajian laporan keuangan CV. ABCD dan membandingkannya secara sistematis dengan ketentuan SAK ETAP guna menentukan tingkat kepatuhannya. Pendekatan ini umum digunakan dalam studi penyajian laporan keuangan karena memungkinkan verifikasi item per item terhadap standar yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga tahap:

1. **Dokumentasi** – Sebagai teknik utama, digunakan untuk mendokumentasikan metadata setiap berkas laporan keuangan.
2. **Pengamatan Dokumen (*Desk Review*)** – Dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap dokumen laporan keuangan CV. ABCD.
3. **Analisis Perbandingan Dokumen** – Digunakan sebagai teknik validasi data dengan membandingkan praktik pelaporan keuangan CV. ABCD dengan ketentuan edisi resmi SAK ETAP tahun 2009 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), guna menilai tingkat kepatuhan antara praktik perusahaan dan standar yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Siklus Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil penelaahan terhadap laporan keuangan CV. ABCD tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan telah menyusun kelima komponen laporan keuangan yang disyaratkan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelengkapan komponen tersebut mengindikasikan bahwa proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran transaksi telah dilaksanakan hingga menghasilkan informasi keuangan pada akhir periode.

Penelitian ini tidak memperoleh akses terhadap dokumen kerja siklus akuntansi berupa jurnal umum, buku besar, neraca saldo, maupun neraca saldo setelah penyesuaian, sehingga tahapan awal siklus akuntansi tidak dapat dianalisis secara langsung. Meskipun demikian, keberadaan laporan keuangan yang lengkap menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan pada akhir periode. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CV. ABCD telah melaksanakan siklus penyusunan laporan keuangan yang menghasilkan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas usaha yang dilakukan, meskipun analisisnya bersifat inferensial karena keterbatasan data yang diperoleh peneliti.

### 2. Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, CV. ABCD telah menyusun kelima komponen laporan keuangan utama untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Laporan posisi keuangan tahun 2024 mencatat total aset sebesar Rp1.785.148.699, terdiri atas aset lancar — didominasi kas dan setara kas Rp247.549.052, piutang usaha Rp373.873.690, dan persediaan Rp65.076.350 — serta aset tidak lancar. Besarnya piutang usaha mengindikasikan sebagian penjualan dilakukan secara kredit, sedangkan struktur liabilitas yang

relatif kecil dibandingkan total aset menunjukkan bahwa sumber pendanaan perusahaan sebagian besar berasal dari modal pemilik.

Laporan laba rugi menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama periode berjalan, di mana pendapatan dari penjualan barang dagang dikurangi harga pokok penjualan dan beban operasional menghasilkan laba bersih pada akhir periode, yang menunjukkan perusahaan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara efektif. Laporan perubahan ekuitas disusun untuk menggambarkan perubahan modal selama periode berjalan, sementara laporan arus kas memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Catatan atas laporan keuangan turut disusun untuk memberikan penjelasan tambahan atas akun-akun tertentu.

Secara formal, kelengkapan kelima komponen tersebut menunjukkan bahwa CV. ABCD telah memahami struktur pelaporan keuangan yang berlaku. Namun demikian, kelengkapan formal ini belum diimbangi dengan kualitas substansi penyajian yang memadai, sebagaimana terlihat dari beberapa pos yang tidak disertai penjelasan cukup dalam catatan atas laporan keuangan serta inkonsistensi antarperiode yang akan diuraikan pada subbagian berikut.

3. Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan

Analisis kesesuaian dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi yang diterapkan CV. ABCD dengan ketentuan SAK ETAP pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek pengukuran aset tetap dan persediaan (SAK ETAP Bab 15 dan 11), serta penyajian laporan arus kas dengan metode tidak langsung (Bab 7), telah sesuai dan konsisten dengan standar. Akan tetapi, ditemukan lima ketidaksesuaian material pada aspek pengakuan dan pengungkapan, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Pajak Penghasilan Tidak Diakui

Laporan laba rugi CV. ABCD tahun 2024 tidak mencantumkan beban pajak penghasilan sehingga laba bersih sebelum dan sesudah pajak tercatat identik sebesar Rp449.294.527. Kondisi ini konsisten dengan catatan atas laporan keuangan yang menyatakan perusahaan hanya mengakui kewajiban pajak berbasis kas dan tidak mengakui pajak tangguhan, meskipun perusahaan tercatat telah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp564.221. Perlakuan ini bertentangan dengan SAK ETAP Bab 24 yang mensyaratkan pengakuan beban pajak secara akrual pada periode terjadinya. Dengan mengacu pada tarif PPh final 0,5% dari omzet (Rp4.463.054.664) sebagaimana diatur PP No. 55 Tahun 2022, beban pajak yang seharusnya diakui adalah Rp22.315.273, sehingga laba bersih setelah pajak yang seharusnya disajikan adalah Rp426.979.254, bukan Rp449.294.527. Akibatnya, laba bersih dan saldo ekuitas tersaji overstated, yang berpotensi menyesatkan pengguna laporan dalam menilai profitabilitas perusahaan.

|                                  |             |           |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK | 449.294.527 | 7.826.611 |
| Pajak Penghasilan                | -           | -         |
| LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK | 449.294.527 | 7.826.611 |

Gambar 1 Laporan Laba Rugi CV. ABCD Tahun 2024 - Tidak Terdapat Beban Pajak Penghasilan

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

**p. Pajak Penghasilan**

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terhutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

---

**Gambar 2 Catatan atas Laporan Keuangan - Kebijakan Pajak Penghasilan**

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pajak Dibayar di Muka       |         |
| PPH 25                      | 564.221 |
| Jumlah Pajak Dibayar Dimuka | 564.221 |

**Gambar 3 Laporan Posisi Keuangan Detail - Pajak Dibayar Di Muka**

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

**2. Imbalan Pascakerja Tidak Diakui**

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa CV. ABCD belum menghitung maupun mengakui kewajiban imbalan pascakerja, meskipun kewajiban tersebut timbul secara konstruktif berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. SAK ETAP Bab 23 mensyaratkan pengakuan kewajiban imbalan pasti menggunakan metode Projected Unit Credit dengan mempertimbangkan asumsi aktuarial. Tidak diakuinya kewajiban ini menyebabkan liabilitas jangka panjang tersaji understated, sehingga penilaian solvabilitas dan struktur keuangan perusahaan menjadi tidak akurat serta menimbulkan risiko sengketa ketenagakerjaan di masa mendatang.

**n. Imbalan Pascakerja**

Kewajiban imbalan pascakerja diakui berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, organisasi diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan undang-undang tersebut adalah program imbalan pasti.

Pengukuran kewajiban imbalan pasti dan beban terkait menggunakan metode Projected Unit Credit, sehingga dalam menghitung kewajiban tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pascakerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi Pemerintah pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Perusahaan tidak menyelenggarakan aset program imbalan pasti. Perusahaan juga belum menghitung imbalan pascakerja.

**Gambar 4 Catatan atas Laporan Keuangan - Imbalan Pascakerja**

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

**3. Inkonsistensi Laporan Perubahan Ekuitas**

Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.209.940.384 tidak sama dengan saldo awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp604.970.192, tanpa disertai rekonsiliasi atau penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip konsistensi antarperiode yang disyaratkan SAK ETAP Bab 3, mengindikasikan kelemahan dalam proses rekonsiliasi data

keuangan, serta mengganggu keterbandingan dan keandalan laporan dari waktu ke waktu.

|         |                                     | Saldo Awal     | Mutasi          |             | Saldo Akhir      |
|---------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|
|         |                                     | 1 Januari 2023 | Penambahan      | Pengurangan | 31 Desember 2023 |
| Ekuitas |                                     |                |                 |             |                  |
|         | Modal Awal                          | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000  |             | Rp 1.000.000.000 |
|         | Laba Ditahan                        | Rp 97.143.581  | Rp 97.143.581   |             | Rp 194.287.162   |
|         | Laba Periode Berjalan               | Rp 7.826.611   | Rp 7.826.611    |             | Rp 15.653.222    |
|         | Prive                               |                |                 |             |                  |
|         | Setoran Tambahan Modal              |                |                 |             |                  |
|         | Deviden                             |                |                 |             |                  |
| Jumlah  |                                     | Rp 604.970.192 | Rp 604.970.192  |             | Rp 1.209.940.384 |
|         |                                     |                |                 |             |                  |
|         |                                     | Saldo Awal     | Mutasi          |             | Saldo Akhir      |
|         |                                     | 1 Januari 2024 | Penambahan      | Pengurangan | 31 Desember 2024 |
| Ekuitas |                                     |                |                 |             |                  |
|         | Modal Awal                          | Rp 500.000.000 |                 |             | Rp 500.000.000   |
|         | Tambahan Modal yang Belum Diaktakan |                | Rp 885.000.000  |             | Rp 885.000.000   |
|         | Laba Ditahan                        | Rp 97.143.581  |                 |             | Rp 97.143.581    |
|         | Laba Periode Berjalan               | Rp 7.826.611   | Rp 449.294.527  |             | Rp 457.121.138   |
|         | Prive                               |                | -Rp 443.030.726 |             | -Rp 443.030.726  |
| Jumlah  |                                     | Rp 604.970.192 | Rp 891.263.801  |             | Rp 1.496.233.993 |

Gambar 5 Laporan Perubahan Ekuitas CV. ABCD 2024

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

4. Modal Tambahan Belum Diaktakan

Laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas periode 2024 memunculkan pos “Tambahan Modal yang Belum Diaktakan” sebesar Rp885.000.000 yang tidak tercatat pada periode sebelumnya dan tidak disertai penjelasan mengenai sumber maupun dasar hukumnya. Kondisi ini tidak memenuhi prinsip pengungkapan penuh sebagaimana disyaratkan SAK ETAP Bab 8, dan menimbulkan risiko hukum terkait keabsahan struktur permodalan serta ketidakjelasan klasifikasi pos tersebut sebagai ekuitas atau liabilitas.

|                                     |   |               |             |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|
| Ekuitas                             |   |               |             |
| Modal Awal                          | 7 | 500.000.000   | 500.000.000 |
| Tambahan Modal yang Belum Diaktakan |   | 885.000.000   | -           |
| Laba Ditahan                        |   | 104.970.192   | 97.143.581  |
| Laba Periode Berjalan               |   | 449.294.527   | 7.826.611   |
| Prive                               |   | (443.030.726) | -           |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas       |   | 1.785.148.699 | 605.937.422 |

Gambar 6 Laporan Posisi Keuangan – Modal

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

|         |                                     | Saldo Awal     | Mutasi          |             | Saldo Akhir      |
|---------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|
|         |                                     | 1 Januari 2024 | Penambahan      | Pengurangan | 31 Desember 2024 |
| Ekuitas |                                     |                |                 |             |                  |
|         | Modal Awal                          | Rp 500.000.000 |                 |             | Rp 500.000.000   |
|         | Tambahan Modal yang Belum Diaktakan |                | Rp 885.000.000  |             | Rp 885.000.000   |
|         | Laba Ditahan                        | Rp 97.143.581  |                 |             | Rp 97.143.581    |
|         | Laba Periode Berjalan               | Rp 7.826.611   | Rp 449.294.527  |             | Rp 457.121.138   |
|         | Prive                               |                | -Rp 443.030.726 |             | -Rp 443.030.726  |
| Jumlah  |                                     | Rp 604.970.192 | Rp 891.263.801  |             | Rp 1.496.233.993 |

Gambar 7 Laporan Perubahan Ekuitas - Tambahan Modal

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

#### 5. Pengungkapan Pajak Dibayar Di Muka Tidak Memadai

Laporan posisi keuangan mencantumkan pos “Pajak Dibayar di Muka” sebesar Rp564.221 dengan referensi catatan nomor 5, namun penomoran catatan atas laporan keuangan melompat langsung dari nomor 4 ke nomor 6 sehingga catatan yang dirujuk tidak tersedia. Ketidadaan ini bertentangan dengan prinsip pengungkapan memadai pada SAK ETAP Bab 8 dan berkaitan erat dengan temuan pertama, karena mengindikasikan inkonsistensi antara kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi secara berkala dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan. Kondisi ini mengurangi keterbacaan laporan dan mencerminkan kelemahan pengendalian internal dalam proses finalisasi laporan keuangan.

| A S E T                   | Cttn  | 2024               | 2023               |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Aset Lancar</b>        |       |                    |                    |
| Kas dan Setara Kas        | 2f, 1 | 247.549.052        | 194.938.411        |
| Piutang                   | 2h, 2 | 373.873.690        | 66.864.636         |
| Persediaan                | 2i, 3 | 65.076.350         | 19.600.000         |
| Pajak Dibayar di Muka     | 5     | 564.221            | -                  |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b> |       | <b>687.063.313</b> | <b>281.403.047</b> |

**Gambar 8 Laporan Posisi Keuangan - Pajak Dibayar Di Muka dengan Referensi Catatan Nomor 5**

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

|                                   |                                 |                                                      |                               |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4) ASET TETAP .....               | 1.098.085.386                   | 324.534.375                                          |                               |
| Akun ini terdiri dari :           |                                 |                                                      |                               |
|                                   | Saldo awal (Rp)<br>Per 1/1/2024 | Mulai Tahun 2023 (Rp)<br>Penambahan      Pengurangan | Saldo Akhir<br>Per 31/12/2024 |
| Harga Perolehan                   |                                 |                                                      |                               |
| Gedung                            | 380.000.000                     | -                                                    | 380.000.000                   |
| Kendaraan                         | 68.650.000                      | -                                                    | 68.650.000                    |
| Peralatan                         | -                               | 904.117.000                                          | 904.117.000                   |
| Inventaris Kantor                 | 38.350.000                      | 3.850.000                                            | 42.200.000                    |
|                                   | 487.000.000                     | 907.967.000                                          | 1.394.967.000                 |
| Akumulasi Penyusutan              |                                 |                                                      |                               |
| Gedung                            | 85.500.000                      | 19.000.000                                           | 104.500.000                   |
| Kendaraan                         | 38.615.625                      | 8.581.249                                            | 47.196.874                    |
| Peralatan                         | -                               | 108.674.323                                          | 108.674.323                   |
| Inventaris Kantor                 | 38.350.000                      | 160.417                                              | 38.510.417                    |
|                                   | 162.465.625                     | 134.415.989                                          | 296.881.614                   |
| Jumlah                            | 324.534.375                     | 134.415.989                                          | 1.098.085.386                 |
|                                   |                                 |                                                      |                               |
| 6) LIABILITAS JANGKA PENDEK ..... | 288.914.706                     | 967.230                                              |                               |
| Akun ini terdiri dari :           |                                 |                                                      |                               |
|                                   | Per 31/12/2024<br>(Rp)          | Per 31/12/2023<br>(Rp)                               |                               |
| Hutang Usaha                      |                                 |                                                      |                               |
| Sriwijaya                         | 201.000.000                     |                                                      |                               |
| CV Adil Jaya                      | 23.760.000                      |                                                      |                               |
| Angga                             | 37.000.000                      |                                                      |                               |
| Hutang Pajak                      | -                               |                                                      | 967.230                       |
| Hutang Pihak Berelasi             |                                 |                                                      |                               |
| Sumber Makanan Nasional           | 27.154.706                      | -                                                    |                               |
| Jumlah                            | 288.914.706                     | 967.230                                              |                               |

**Gambar 9 Catatan atas Laporan Keuangan - Penomoran Catatan Melompat dari Nomor 4 ke Nomor 6**

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan CV. ABCD (2024)

Secara keseluruhan, kelima temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan CV. ABCD bersifat material pada aspek pengakuan dan

pengungkapan, serta mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip akrual sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang wajar sesuai SAK ETAP.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan CV. ABCD dengan SAK ETAP ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, siklus penyusunan laporan keuangan CV. ABCD secara hasil akhir sudah lengkap — tercermin dari tersedianya kelima komponen laporan keuangan — namun belum dilengkapi mekanisme pengendalian kualitas yang memadai, sebagaimana terlihat dari inkonsistensi referensi catatan dan perbedaan saldo antarperiode.

Kedua, CV. ABCD telah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan yang disyaratkan SAK ETAP, yang menunjukkan pemahaman perusahaan terhadap struktur pelaporan. Namun, kelengkapan formal ini belum diimbangi kualitas substansi penyajian yang memadai, ditandai dengan pos-pos tanpa penjelasan cukup dalam catatan atas laporan keuangan serta inkonsistensi kebijakan akuntansi.

Ketiga, penyusunan laporan keuangan CV. ABCD belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP, terutama pada aspek pengakuan dan pengungkapan, sementara aspek pengukuran aset tetap dan persediaan (Bab 15 dan 11) serta penyajian arus kas metode tidak langsung (Bab 7) telah sesuai dan perlu dipertahankan. Lima temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Temuan Ketidaksesuaian SAK ETAP pada CV. ABCD

| No. | Temuan Ketidaksesuaian                                                            | Dampak                                                                 | Kesesuaian SAK ETAP   | Rekomendasi Perbaikan                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Beban pajak penghasilan tidak diakui secara akrual dalam laporan laba rugi        | Laba bersih overstated Rp22.315.273; kewajiban pajak tidak tercermin   | Tidak Sesuai (Bab 24) | Akui beban pajak penghasilan 0,5% x omzet setiap periode               |
| 2   | Kewajiban imbalan pascakerja tidak dihitung dan tidak diakui                      | Liabilitas jangka panjang understated; risiko sengketa ketenagakerjaan | Tidak Sesuai (Bab 23) | Hitung kewajiban imbalan dengan metode Projected Unit Credit           |
| 3   | Saldo akhir ekuitas 2023 tidak sama dengan saldo awal 2024 tanpa rekonsiliasi     | Keterbandingan antar periode terganggu; keandalan diragukan            | Tidak Sesuai (Bab 3)  | Lakukan rekonsiliasi dan ungkapkan penyebab perbedaan saldo dalam CaLK |
| 4   | Tambahan modal belum diaktakan sebesar Rp885.000.000 tanpa penjelasan dasar hukum | Risiko hukum permodalan; transparansi berkurang;                       | Tidak Sesuai (Bab 8)  | Selesaikan akta notaris dan ungkapkan status legalisasi dalam CaLK     |

| No. | Temuan Ketidaksesuaian                                                      | Dampak                                                       | Kesesuaian SAK ETAP  | Rekomendasi Perbaikan                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | klasifikasi ekuitas dipertanyakan                            |                      |                                                                               |
| 5   | Referensi catatan nomor 5 (Pajak Dibayar di Muka) tidak tersedia dalam CaLK | Pengguna laporan tidak dapat menelusuri asal-usul aset pajak | Tidak Sesuai (Bab 8) | Tambahkan catatan nomor 5 yang menjelaskan jenis pajak dan rencana kompensasi |

Secara keseluruhan, kelima temuan tersebut bersifat material pada aspek pengakuan dan pengungkapan, sementara praktik pengukuran aset tetap dan persediaan serta penyajian arus kas sudah sesuai dengan SAK ETAP dan perlu dipertahankan. Hal ini mengindikasikan bahwa CV. ABCD masih memerlukan peningkatan signifikan dalam penerapan prinsip akrual, perhitungan kewajiban jangka panjang, konsistensi antarperiode, serta kelengkapan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

## REFERENCES

- Abbas, H., Susanti, N., Febrina, R., & Badewin, B. (2025). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TEKULAI HULU KECAMATAN TANAH MERAH. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 159–172.
- Adillah, A. N., Yamin, M., & Masyhurii, M. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 201 PADA SPBU KEC. DUA BOCCOE, KAB. BONE. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 658–668. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6476>
- Afif, A. (2022). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PELAKU UMKM BERDASARKAN SAK-EMKM. *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 1(2), 24–35.
- Afkarini, I., & Febriana, A. (2025). ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGGAH (UMKM) UD. AJIWON POLYBOGA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2109–2126. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5926>
- Asmarawati, B. (2026). Pelaporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 7(2), 1296–1308.
- Ayem, S., & Kentari, A. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(4), 175–184. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i4.191>
- Ayu Purba, T. S., Simbolon, R. D., Simbolon, A. M., Sianipar, Y. S., & Putri Aruan, H. M. G. (2025). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1322–1330. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2762>
- Ayuk Yuliana. (2023). PENERAPAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN ETIKA DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 316–327. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.812>
- Azizah, N., Kusnoto, M. A., Nurafifah, N., Dhewi, D. A., & Mais, R. G. (2025). Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Laporan Keuangan BumDes Ayu Bagia, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *SUSTAINABLE*, 4(2), 338–358. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i2.25017>
- Dewan Standar Akuntan Indonesia. (2016). *STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK* (Ikatan Akuntan Indonesia, Ed.; Kelima). Grha Akuntan.

- Dharma, B., Ramadhani, Y., & Reitandi, R. (2023). Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Suatu Perusahaan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 137–143. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3209>
- Gaghenggang, M., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 1013–1022.
- Hakim, Latif, E. A., & Albab, U. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akutansi terhadap pelaporan keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Kabupaten Cilacap. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 352–362.
- Halim, E. M., Tinangon, J., & Pinatik, S. (2021). ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM ATAS PERSEDIAAN PADA CV. JAYA MAKMUR. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.16.1.35909.2021>
- Hariza, R., Rahmadi, R., & Fahrudin, T. (2025). Penerapan SAK ETAP sebagai Strategi Peningkatan Transparansi Laporan Keuangan. *Al Dzahab*, 6(2), 191–199. <https://doi.org/10.32939/dhb.v6i2.5834>
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1).
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Leo, L., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. (2023). *Akuntansi Keuangan*.
- Lestari, R. A., Nursanty, I. A., & Amrul, R. (2024). Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 986–995. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i3.152>
- Madaharsa, A. S., & Muslimin, M. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN JASA. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(2), 270–286. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2681>
- Maryanto, M. (2019). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DAN KESESUAIANNYA DENGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *JURNAL EKONOMI SAKTI (JES)*, 8(1), 50. <https://doi.org/10.36272/jes.v8i1.189>
- Muslimah, L. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 918–923. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i5.2021>
- Pratama, R., & Epi, Y. (2024). Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pada Depot Air Minum Alif Water. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovasi Dan Kolaborasi Disiplin Ilmu*, 1(1), 55–65.
- Purba, I. E., Simaremare, R., Harefa, H. J., Siburian, S., Gandi, H. M., & Aruan, P. (2025). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1636–1643.
- Rahmawati, A., Jodiansyah, K. R. P., Yunita, R., & Insani, S. H. (2025). Peran Akuntansi Manajemen Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Perusahaan. *Journal ANC*, 1(5), 421–431.
- Rasyid, M. (2022). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS WITHOUT PUBLIC ACCOUNTABILITY (SAK ETAP) ON THE PRESENTATION OF GIRIREJO VILLAGE UNIT'S COOPERATIVE FINANCIAL STATEMENTS. *MARGINAL : JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/10.55047/marginal.v1i2.112>
- Sardjan, B., & Basra, B. (2023). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT. MANDIRI PERKASA UTAMA DI MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 6(2), 30–38.
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 320–338. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.

- Susanto, S., Zarefar, A., & Ali, F. (2020). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 41–50. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i1.3601>
- Tuli, H., & Mahmud, M. (2025). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi UMKM. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(2), 90–95. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v4i2.106>
- Yusuf, Muh. F. M., & Omasrianto. (2025). Akuntansi Keberlanjutan: Peran Akuntan dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Risiko Fisik Iklim. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 6(1), 38–67. <https://doi.org/10.24853/jago.6.1.38-67>